

Upaya Kelompok Perempuan Sungai Lemau dalam Merespons Bencana Ekologis di Bengkulu Tengah

Shendy*, Panji Suminar, Ika Pasca Himawati

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

*shennndys@gmail.com

Abstract

Ecological disasters have resulted in environmental damage such as the sedimentation of the Lemau river estuary and abrasion on the coast of Central Bengkulu Regency. The increasingly critical environmental conditions have encouraged the women of Pondok Kelapa Village, who are housewives, to form the Lemau River Women's Group to participate together in efforts to save the environment. This research highlights the efforts made by the Lemau River Women's Group in responding to ecological disasters and environmental damage in Pondok Kelapa II Village, Central Bengkulu Regency, Bengkulu Province. A qualitative research method with a descriptive approach was chosen to explain the efforts made by the Lemau River Women's Group in advocating for environmental protection as a response to influence public policy and save the village's coastal area. The research data were collected through non-participant observation, in-depth interviews, and documentation, and then the data analysis stage was carried out. The results showed that the efforts made by women's groups in responding to ecological disasters include: non-litigation environmental advocacy as an attempt to influence policies that are environmentally sound and gender-responsive are still being fought for by women's groups today, other initiatives are efforts to adapt and mitigate ecological disasters carried out by groups by switching jobs to find alternative sources of income or economy from the previous way of utilizing marine products, then some initiatives have been carried out by women's groups by planting mangroves which aim to be an ecosystem rehabilitation action for further response to mitigate disasters and save the village coastal area. This research concludes that environmentally conscious women have become a pressure group for public policies that are not ecologically sound and have an impact on the ecological, and socio-economic conditions of the community. Women's groups are also at the forefront of responding to ecological disasters and environmental damage through disaster adaptation and mitigation efforts.

Keywords: *Ecological Disaster; Coastal Community; Women's Group; Ecofeminism*

Abstrak

Bencana ekologis telah mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti sedimentasi muara sungai Lemau dan abrasi di pesisir Kabupaten Bengkulu Tengah. Kondisi lingkungan yang semakin kritis tersebut telah mendorong para perempuan Desa Pondok Kelapa yang merupakan ibu rumah tangga membentuk Kelompok Perempuan Sungai Lemau untuk berpartisipasi bersama melakukan upaya penyelamatan lingkungan. Penelitian ini menyoroti terkait upaya yang dilakukan Kelompok Perempuan Sungai Lemau dalam merespons bencana ekologis dan kerusakan lingkungan di Desa Pondok Kelapa II, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Kelompok Perempuan Sungai Lemau dalam advokasi penyelamatan lingkungan hidup sebagai respons untuk memengaruhi kebijakan publik dan penyelamatan kawasan pesisir desa. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi non

partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk kemudian dilakukan tahap analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kelompok perempuan dalam merespons bencana ekologis antara lain, advokasi lingkungan hidup non litigasi sebagai upaya untuk memengaruhi kebijakan yang berwawasan lingkungan dan responsif gender masih diperjuangkan kelompok perempuan hingga saat ini, inisiatif lainnya adalah upaya adaptasi dan mitigasi bencana ekologis yang dilakukan kelompok dengan cara beralih pekerjaan guna menemukan sumber pendapatan atau ekonomi alternatif dari cara sebelumnya yang memanfaatkan hasil laut, kemudian terdapat inisiasi yang pernah dilakukan kelompok perempuan dengan cara melakukan penanaman *mangrove* yang bertujuan sebagai aksi rehabilitasi ekosistem atas respons lanjutan guna memitigasi bencana dan penyelamatan kawasan pesisir desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan yang sadar lingkungan telah menjadi *pressure group* atas kebijakan publik yang tidak berwawasan lingkungan dan berdampak pada kondisi ekologis, sosial ekonomi masyarakat. Kelompok perempuan juga menjadi garda terdepan dalam merespons bencana ekologis dan kerusakan lingkungan melalui upaya adaptasi dan mitigasi bencana.

Kata Kunci: Bencana Ekologis; Masyarakat Pesisir; Kelompok Perempuan; Ekofeminisme

Pendahuluan

Persoalan lingkungan telah menjadi isu global yang sangat urgen dibahas dewasa ini, terutama berkaitan dengan bencana ekologis yang menjadi ancaman serius bagi manusia (Wahyu & Batara, 2022). Dampak dari bencana ekologis ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti perempuan (Bangun, 2020). Perempuan dalam ruang hidupnya yang domestik sangat dekat dan bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya (Azmi et al., 2021).

Ketika terjadi banjir, longsor dan kerusakan lahan serta dampak lainnya dari bencana ekologis, perempuan dalam ranah domestik harus berusaha lebih keras dengan beban dan waktu kerjanya untuk memenuhi kebutuhan rumah seperti menyediakan air bersih, memastikan bahan makanan, memasak, mencuci, serta mengurus anak, termasuk mengurus apabila ada yang sakit di rumah (Akbar et al., 2022). Hal tersebut berimbas pada peningkatan beban perempuan dalam memastikan kehidupan rumah tangga dan keluarga tetap berlangsung namun pada saat yang sama memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya dan proses pengambilan keputusan ketika ruang hidupnya terancam akibat bencana ekologis (Dewi, 2016).

Perempuan dan laki-laki di setiap tingkatan seharusnya mempunyai hak dan pengaruh yang sama dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan lingkungan (Akbar et al., 2022). Dalam kajian ekologi politik feminis, degradasi dan kerusakan lingkungan dipandang memiliki keterkaitan dengan persoalan politik dan ekonomi. Ekologi politik feminis melihat politik dan kekuasaan secara berbeda, yang keduanya memiliki keterkaitan erat dengan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam konteks ekonomi politik sumber daya alam, politik degradasi lingkungan (Indirastuti & Pratiwi, 2019).

Keterlibatan perempuan lokal sebetulnya memiliki peranan penting dalam mitigasi dan adaptasi bencana, walaupun dalam tingkatan yang rendah (Ramadhoan et al., 2023). Namun perempuan terus mengembangkan inisiatif-inisiatif dalam merespons bencana ekologis, baik secara individu maupun berkelompok (Handayani, 2019). Perempuan juga berinisiatif untuk bertahan hidup akibat semakin terbatas dan terancam

sumber-sumber penghidupannya, serta berbagai peranan yang dilakukan perempuan bersama komunitasnya mulai dari menemukan cara baru untuk bertani, pengalihan pola tanam, serta mengelola dan memanfaatkan hasil hutan dan laut dengan tidak merusak habitatnya (Saleh, 2014). Tentu saja pengalaman domestik perempuan tidak membatasi ruang gerak untuk melakukan upaya perbaikan walaupun dengan cara sederhana sekalipun, bila itu dilakukan bersama komunitasnya secara terus menerus maka dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan (Priyatna et al., 2017).

Dengan demikian perempuan mempunyai peran sentral dan strategis dalam pengelolaan lingkungan (Astuti, 2012). Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 525 km yang membentang dari Tenggara ke arah Barat Daya, mulai dari Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Provinsi Lampung hingga Kabupaten Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Ada tujuh kabupaten dan satu kota yang membentang di sepanjang pesisir Bengkulu dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang setiap detik ombak ganasnya mengikis bibir pantai, pun angin kencang ikut mempercepat hilangnya daratan.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2023, Provinsi Bengkulu memiliki indeks risiko sebesar 148.75 yang termasuk kategori tinggi. Sebagai wilayah ditingkat daerah provinsi untuk mitigasi bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Bengkulu sebagai wilayah risiko bencana tinggi yang setiap tahunnya terjadi abrasi, longsor, banjir, gempa bumi, gelombang pasang laut dan puting beliung. Bentang alam Provinsi Bengkulu yang identik dengan pesisir menjadikannya sebagai wilayah potensi bencana, terdapat 184 desa di tepian pesisir yang terancam abrasi dan longsor.

Bagi masyarakat di pesisir yang terancam ruang hidupnya ini, hal yang diinginkan tentunya adalah desa mereka tidak hilang ditenggelamkan laut. Namun bila tidak ada intervensi dari pemerintah dan para pemangku kepentingan maka lambat laun dapat dipastikan desa mereka ikut tenggelam. Situasi tersebut yang saat ini dihadapi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Pondok Kelapa II. Bencana ekologis dan degradasi lingkungan telah mengakibatkan kerusakan lahan dan permukiman masyarakat yang terletak di pesisir barat Provinsi Bengkulu ini semakin tergerus, sehingga dalam kurun waktu 20 tahun kedepan desa ini diperkirakan terancam hilang.

Kondisi tersebut yang kemudian mendorong para perempuan di Desa Pondok Kelapa II yang tergabung kedalam Kelompok Perempuan Sungai Lemau melakukan upaya penyelamatan untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan pesisir. Inisiatif yang dilakukan kelompok perempuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan pesisir dan oleh karena ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan masyarakat yang perlu diselamatkan. Beberapa penelitian tentang upaya kelompok perempuan dalam kaitannya dengan persoalan lingkungan pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian Nur et al., (2024) yang menyimpulkan bahwa secara global tantangan menghadapi bencana perubahan iklim sangat berat, sehingga perlu sinergitas segenap lapisan masyarakat global termasuk peran perempuan.

Kemudian penelitian Astono et al., (2024) menyimpulkan bahwa diperlukan pengakuan atas kontribusi perempuan adat dalam pelestarian lingkungan hidup, serta upaya bersama untuk melindungi hak-hak mereka dan mempertahankan keseimbangan ekosistem di Kalimantan Barat. Lalu penelitian Susanti & Ardiputra (2021) menemukan bahwa perempuan pesisir di Desa Maliaya berperan penting dalam ketahanan keluarga pasca gempa di Kabupaten Majene yang secara ekonomi, keluarga sudah memenuhi indikator ketahanan, namun belum stabil secara fisik, karena perempuan dan anak-anak masih merasakan trauma pasca bencana.

Penelitian Setyani (2019) juga menyimpulkan bahwa perempuan Samin dalam bagian keluarga mempunyai peranan untuk mendidik dalam proses terciptanya lingkungan hidup yang baik melalui penyadartahuan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini komunitasnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tersebut, penulis tertarik mengulas lebih jauh mengenai upaya kelompok perempuan sungai lemau dalam merespons bencana ekologis di Bengkulu Tengah. Masalah penelitian ini menyoal pada bagaimana upaya yang dilakukan Kelompok Perempuan Sungai Lemaу dalam merespons bencana ekologis dan kerusakan lingkungan di Desa Pondok Kelapa II Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Kelompok Perempuan Sungai Lemaу dalam advokasi lingkungan hidup sebagai respons untuk memengaruhi kebijakan publik dan penyelamatan kawasan pesisir Desa Pondok Kelapa II. Penulis melihat perlu adanya kajian mengenai upaya kelompok masyarakat rentan pada tingkat akar rumput sekalipun, terkhususnya Kelompok Perempuan Sungai Lemaу yang telah lama berjuang di ruang publik untuk menyelamatkan daratan Desa yang semakin hari semakin hilang dan rusak akibat bencana ekologis, serta sumber-sumber penghidupan masyarakat yang terancam. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif ekofeminisme, menurut Shiva (2005) ekofeminisme merupakan gerakan yang diasosiasikan dengan kaum perempuan yang memiliki tugas khusus yang harus dilakukan dalam masa-masa yang menyakitkan akibat kerusakan lingkungan.

Melihat bahwa fenomena atau kasus yang dialami oleh Kelompok Perempuan Sungai Lemaу dan kerusakan lingkungan di Desa Pondok Kelapa II menekankan bahwa pentingnya keterlibatan aktif dan partisipasi perempuan dalam perjuangan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan sumber-sumber penghidupan mereka, sebagaimana bagian dari proses panjang advokasi lingkungan yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Perjuangan untuk mengatasi masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memberdayakan perempuan dan mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan (Shiva & Mies, 2005).

Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta merekonstruksi fenomena ataupun realitas sosial yang berlangsung di masyarakat Desa Pondok Kelapa II secara keilmuan. Sumber data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi non partisipan untuk mengamati kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Pondok Kelapa II dan bagaimana kelompok perempuan sungai lemaу bertahan dan menanggapi kondisi tersebut. Fakta hasil observasi kemudian diperkuat dengan wawancara mendalam bersama 3 informan pengurus KPSSL, Kepala Desa Pondok Kelapa dan pengurus WALHI Bengkulu. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi kegiatan atau agenda advokasi lingkungan yang telah dilakukan kelompok, seperti laporan kegiatan, media *online* atau berita, foto serta catatan lapangan kelompok saat didampingi oleh WALHI Bengkulu. Analisis data penelitian ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan (Denzin & Lincoln, 2011). Pada tahap reduksi data, seleksi dan klasifikasi dilakukan guna menyederhanakan seluruh informasi sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Tahap analisis data ditujukan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan selanjutnya guna menyusun informasi yang runut dan sistematis berdasarkan data yang telah tersusun. Penarikan kesimpulan didapatkan melalui interpretasi hasil dan analisis data yang disesuaikan dengan topik, masalah dan tujuan penelitian.

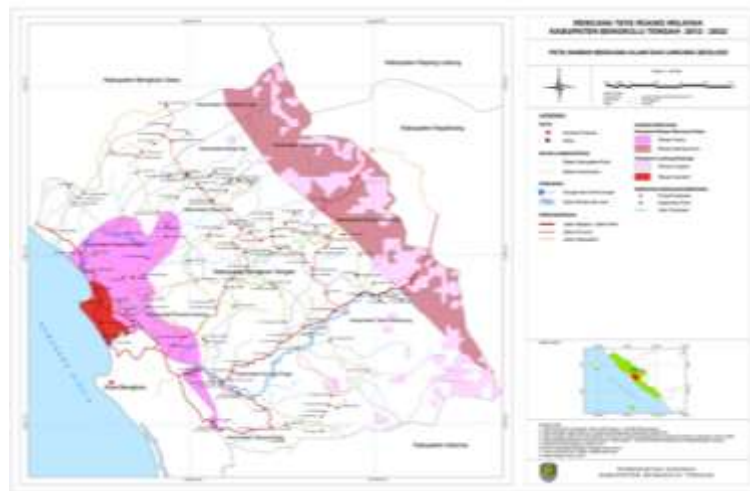
Hasil dan Pembahasan

1. Bencana Ekologis di Bengkulu Tengah

Desa Pondok Kelapa II merupakan salah satu desa yang berada di pesisir barat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Desa ini terancam hilang dalam 20 tahun kedepan akibat terjadinya abrasi pantai dan sedimentasi di muara Daerah Aliran Sungai (DAS) Lemau yang sampai saat ini terkesan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kerusakan lingkungan tersebut telah terjadi sejak tahun 1990. Hal ini kemudian dipercepat dengan adanya aktivitas penambangan galian c sekitar tahun 1992 di pantai, dan sempat berhenti karena adanya penolakan dari masyarakat. Kemudian tahun 2014 galian c aktif kembali dan berpindah lokasi ke DAS Lemau oleh perusahaan Mustika Group dan sampai saat ini galian c masih beraktivitas di DAS Lemau. Tercatat pada 26 April 2019 banjir rob setinggi 1,5 meter menimpa Desa Pondok Kelapa II yang mengakibatkan 27 orang meninggal, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, hancurnya rumah dan infrastruktur serta ribuan warga terpaksa mengungsi.

a. Kerusakan Lingkungan Fisik Desa

Menurut pengakuan Alamsyah selaku Kades Pondok Kelapa II bahwa abrasi dan sedimentasi telah mencapai 1 kilometer dalam rentang waktu 30 tahun terakhir. Abrasi dan sedimentasi terparah terjadi di wilayah Desa Pondok Kelapa 1 dan Desa Pondok Kelapa 2 sehingga mengancam ruang hidup masyarakat yang telah bermukim selama turun temurun. Selain mengalami abrasi pantai, sedimentasi muara sungai yang berasal dari luapan DAS Lemau, wilayah pesisir desa merupakan wilayah zona bencana Tsunami yang termasuk dalam zona merah rawan bencana.



Gambar 1. Peta Rawan Bencana Alam dan Lindung Geologi
(Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah 2012-2032)

Kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai dan sedimentasi sungai Lemau tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan disepanjang pesisir barat sehingga daya dukung lingkungannya menurun. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032. Rencana Pola Kawasan Lindung menyatakan bahwa Desa Pondok Kelapa termasuk Kawasan Rawan Bencana Alam. Sedangkan untuk Kawasan Perlindungan berupa Kawasan Sempadan Pantai dialokasikan sepanjang 37,7 kilometer dengan total luas 419 hektar. Namun di sisi lain wilayah pesisir Desa Pondok Kelapa juga diperuntukan bagi eksplotasi pertambangan dan saat ini terdapat HGU tambak yang telah beroperasi dengan luas total 70 hektar.

b. Dampak Bencana Terhadap Sosio-Ekonomi Masyarakat

Masyarakat desa saat ini sedang berhadapan dengan permasalahan ruang hidup yakni ancaman terhadap pemukiman, infrastruktur dan kehilangan mata pencaharian akibat abrasi di wilayah pesisir desa yang semakin parah. Nelayan yang dahulu

mengandalkan hidupnya dari laut juga turut merasakan dampaknya, sejak 2015 banyak nelayan mulai beralih pekerjaan baru karena berkurangnya hasil tangkapan dan sulitnya kapal nelayan mendarat ke muara. Imbasnya juga pada bangunan Tempat Pelelangan Ikan yang sebelumnya menjadi tempat untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan sekarang telah terbengkalai karena adanya sedimentasi di muara sungai Lemau.



Gambar 2. Kondisi Bangunan Tempat Pelelangan Ikan Desa Pondok Kelapa
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Selain sedimentasi muara sungai Lemau, abrasi pantai juga menjadi ancaman nyata yang sangat berdampak pada permukiman dan infrastruktur desa. Ombak lautan yang ganas telah menyebabkan terkikisnya daratan tempat tinggal 155 KK warga yang bermukim di sepanjang pesisir desa. Intrusi air laut ke muara sungai Lemau telah menyisakan rumah dan kebun masyarakat yang sebagian ambles, rata dan hanyut terbawa arus laut.



Gambar 3. Intrusi Air Laut di Muara Sungai Lemau
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Dalam RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032, menyebutkan bahwa Desa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah merupakan Kawasan Lindung karena wilayah desa Pondok Kelapa merupakan Zona Merah Bencana Tsunami. Namun disisi lain Desa Pondok Kelapa Tengah juga merupakan Kawasan Budidaya dan kawasan strategis ekonomi berupa kawasan potensial minapolitan tangkap. Kondisi ini menyebabkan perlindungan ruang dan kawasan Desa Pondok Kelapa menjadi terabaikan. Padahal keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya merupakan faktor penting dalam Rencana Tata Ruang Berbasis Bencana. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang harus memperhatikan pada aspek kebencanaan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan masyarakat.

2. Kelompok Perempuan Sungai Lemau Merespons Kondisi Lingkungan Desa

Kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan dan ancaman bencana yang bisa kapan saja terjadi menjadi perhatian serius WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bengkulu untuk menginisiasi para perempuan Desa Pondok Kelapa II membentuk suatu kelompok perempuan yang peduli atas kondisi lingkungan yang terjadi. Kelompok Perempuan Sungai Lemau dibentuk pada tahun 2019. Menurut Rania selaku ketua KPSL, kelompok memiliki 33 anggota yang mayoritas anggotanya merupakan ibu rumah tangga yang setiap hari bersentuhan langsung dengan kerusakan lingkungan desa.

Sejak dibentuk 5 tahun lalu hingga sampai saat ini pelbagai upaya telah dilakukan KPSL didampingi WALHI Bengkulu. Upaya-upaya yang dilakukan adalah advokasi lingkungan jalur non litigasi, telah banyak aktivitas kelompok melakukan audiensi dan *lobby* kebijakan dengan pelbagai Organisasi Perangkat Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi. Rania menyatakan bahwa telah bertemu dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten, Pemkab Bengkulu Tengah, Balai Prasarana DAS, BBWS VII, dan terakhir tahun 2022 audiensi ke BPDASHL Ketahun Bengkulu dan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di desa.

a. Upaya Kelompok Dalam Memengaruhi Kebijakan

Perjuangan Kelompok Perempuan Sungai Lemau dalam advokasi lingkungan non litigasi ini bukan hanya soal respons atas bencana ekologis dan kerusakan lingkungan yang kian hari semakin masif terjadi. Akan tetapi juga tentang bagaimana kelompok rentan seperti KPSL ini terlibat dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Terdapat beberapa kebijakan yang pernah coba didorong oleh kelompok dalam proses pembangunan di Desa Pondok Kelapa II antara lain, pemulihan kawasan pesisir, peningkatan *alternative* ekonomi produktif berbasis komunitas, pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan produk berbasis lokal untuk mendorong terbentuknya kelembagaan untuk memastikan pengembangan akses pasar

Artinya kemudian bahwa ruang dan peluang perempuan untuk maju sebagai garda terdepan yang dapat melakukan transformasi sosial telah terbuka dengan cara-cara yang bermartabat (Yogiswari, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan ekofeminisme yang menekankan perlunya mengadopsi pendekatan holistik dalam melihat isu lingkungan dan gender, serta membangun solidaritas antara perempuan dan gerakan lingkungan untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih luas (Suliantoro & Murdiati, 2019). Menjadi tantangan bagi KPSL untuk bisa mengisi ruang tersebut melalui pelibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan ditingkat lokal agar dapat berkontribusi bagi keadilan ekologis Desa Pondok Kelapa.



Gambar 4. Audiensi KPSL dengan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu
(Sumber: Dokumentasi WALHI Bengkulu, 2022)

Dalam perspektif ekofeminisme Shiva menyatakan bahwa perempuan dipandang sebagai penjaga alam dan pengatur sumber daya alam yang diperoleh dari alam juga, maka pemahaman dan partisipasi perempuan dalam masalah lingkungan dan isu-isu ekologis sangat penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia (Kumari et al., 2020). Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan KPSL ini juga membuktikan bahwasannya perempuan Desa Pondok Kelapa II secara sadar berani ambil bagian dalam proses-proses politik ditingkat lokal, termasuk ikut menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan dan lingkungan sebagai kelompok penekan dalam menyikapi persoalan bencana ekologis dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

b. Upaya Kelompok dalam Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Selain advokasi lingkungan non litigasi untuk memengaruhi kebijakan, inisiatif lainnya juga dilakukan oleh KPSL terkait upaya adaptasi dan mitigasi bencana. Salah satunya pengalaman masyarakat dalam upaya adaptasi bencana yang dilakukan selama ini yaitu dengan meningkatkan ekonomi alternatif di luar hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak, Nunung selaku pengurus KPSL menyampaikan bahwa karena adanya abrasi dan sedimentasi muara Lemau sangat berpengaruh terhadap pendapatan suami mereka yang pergi melaut.

Kebanyakan suami dahulunya adalah sebagai nelayan, namun sekarang beralih pekerjaan sebagai buruh dan petani. Lebih lanjut, Nunung menyampaikan bahwa alternatif berikutnya yang selama ini masyarakat kerjakan adalah dengan memanfaatkan lahan eks HGU Tambak Udang yang terletak dipinggir pesisir pantai pondok kelapa. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain yaitu menanam tanaman pangan seperti ubi kayu, jagung, pisang, dan sayur-sayuran. Sebagian lainnya menjadikan lahan tersebut sebagai sumber pakan bagi hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat.



Gambar 5. Aksi Penanaman *Mangrove* di Pesisir Desa Pondok Kelapa II
(Sumber: Dokumentasi KPSL, 2022)

Sedangkan upaya mitigasi bencana ekologis pernah berhasil dilakukan masyarakat, yakni perlawanan terhadap aktivitas penambangan galian c baik di muara sungai Lemau dan dipesisir pantai. Pada tahun 2006 masyarakat Pondok Kelapa II merasakan dampak dari aktivitas penambangan galian c, kemudian melakukan penolakan dan berhasil menghentikan aktivitas penambangan. Namun pada tahun 2014, penambangan galian c kembali dilakukan hingga menjadi salah satu faktor penurunan daya dukung lingkungan pesisir. Tercatat bahwa upaya mitigasi bencana ekologis yang dilakukan oleh KPSL adalah melakukan penghijauan pesisir dengan cara aksi penanaman *mangrove*. *Mangrove* dapat menjadi alternatif dalam mitigasi bencana di pesisir desa, oleh karena rehabilitasi *mangrove* selain untuk mempertahankan ekosistem di pesisir pantai juga merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir dampak bencana tsunami, banjir dan abrasi yang telah dipraktekan di beberapa daerah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, upaya KPSL dalam merespons bencana ekologis di Bengkulu Tengah memperlihatkan bahwa kelompok perempuan memiliki kapasitas untuk memanfaatkan pengetahuan lokal dan keterampilan yang mendukung dalam mengurangi risiko bencana ekologis. Kelompok perempuan menjadi garda terdepan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ruang hidup dan penghidupannya, dimulai dari tingkatan keluarga hingga komunitasnya. Kelompok perempuan juga telah menjadi *pressure group* terhadap kebijakan yang tidak berwawasan lingkungan, dan oleh karenanya perempuan mempunyai hak yang sama dalam menentukan kebijakan atas lingkungan yang baik dan sehat. Kendati sampai saat ini, upaya untuk memengaruhi kebijakan masih belum menunjukkan perbaikan pada kondisi lingkungan di desa, upaya adaptasi dan mitigasi bencana ekologis yang dilakukan KPSL telah menjadi suatu upaya dalam merespons bencana ekologis melalui aktivitas rehabilitasi ekosistem serta tindakan untuk menyesuaikan pada kondisi yang sedang terjadi. Oleh karena kedekatannya dengan lingkungan, membuat kelompok perempuan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai *watcher* di tingkat akar rumput.

Daftar Pustaka

- Akbar, H., Anggraini, M., Primayanti, R., Tyaswana, A. R., & Salma, N. (2022). *Jejak Perempuan dalam Upaya Mitigasi Lingkungan Global*. Yogyakarta: LPPM UPNYK Press.
- Astono, A., Muyassar, Y. R., & Wagner, I. (2024). Perempuan Dayak Dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme Terhadap Hukum Lingkungan Di Kalimantan Barat (Studi kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 8-16.
- Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. *Indonesian Journal Of Conservation*, 1(1), 49-60.
- Azmi, A. I., Alisa, A. N., & Oktavia, F. (2021). Strategi Gerakan Perempuan (Green Woman) Dalam Melawan Pencemaran Lingkungan Oleh Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 66-77.
- Bangun, B. H. (2020). Ecofeminism and Enviromental Protection: A Legal Perspective. *Jambe Law Journal*, 3(1), 1-18.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, P. (2016). Mewujudkan Keadilan Gender dalam Respon Perubahan Iklim. *Jurnal Tanah Air*, 1, 23-34.
- Handayani, B. L. (2019). Memperkuat Modal Sosial Perempuan Dalam Menghadapi Bencana. *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 1-30.
- Indirastuti, C., & Pratiwi, A. M. (2019). Ketika Lahan Basah Mengering: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan. *Jurnal Perempuan*, 24(4), 335-349.
- Kumari, J., Behura, A. K., & Kar, S. (2020). Women's Attitude Towards Environment Sustainability Through Natural Preservation. *Problem of Sustainable Development*, 15(1), 103-107.
- Nur, S., Fatimah, H., Zakaria, Z., & Syamsidar, H. S. (2024). Peran Perempuan Dalam Upaya Mitigasi Bencana Perubahan Iklim. *An-Nisa*, 17(1), 33-40.
- Priyatna, A., Subekti, M., & Rachman, I. (2017). Ekofeminisme Dan Gerakan Perempuan Di Bandung. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(3), 439-454.

- Ramadhan, R. I., Hadi, K., Dewayani, E. K. U., & Argubi, A. H. (2023). Developing a Model of Women's Empowerment for Environmental Adaptation and Disaster Mitigation in Malang Regency. *Sospol*, 9(2), 160-175.
- Saleh, M. (2014). Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 6(2), 236-259.
- Setyani, I. (2019). Eksplorasi Peran Perempuan Samin Dalam Melestarikan Lingkungan Alam (Exploring The Roles of Samin Women in Preserving The Natural Environmen). *Jurnal Psikologi Perseptual*, 4(2), 111-119.
- Shiva, V., & Mies, M. (2005). *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press.
- Suliantoro, B. W., & Murdiati, C. W. (2019). *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Susanti, E., & Ardiputra, S. (2022). Peran Perempuan Pesisir Terhadap Ketahanan Keluarga Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Maliaya, Kabupaten Majene Tahun 2021. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 417-436.
- Wahyu, M., & Batara, A. T. (2022). Etika Lingkungan Dan Ancaman Kebijakan Kontraekologis Dari Masa Ke Masa (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Lingkungan Demi Pembangunan Generasi Emas 2045). *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)*, 3(1), 57-67.
- Yogiswari, K. S. (2018). Corak Budaya Patriarki Dalam Perkembangan Ilmu dan Teknologi: Perspektif Ekofeminisme Vandana Shiva. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 9(2), 17-27.